

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALEG MUDA DALAM  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA  
SRIBHAWONO KAB. LAMPUNG TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**EVA YULIANTI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALEG MUDA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA SRIBHAWONO KAB. LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**Eva Yulianti**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Desa Sribhawono Kab. Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel 42 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik penunjang wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemahaman masyarakat terhadap caleg muda di Desa Sribhawono diperoleh sebanyak 47,61% atau 20 responden yang menyatakan paham terhadap intelektual, moral, sosial caleg muda di Desa Sribhawono, (2) Tanggapan masyarakat terhadap munculnya caleg muda di Desa Sribhawono diperoleh sebanyak 45,23% atau 19 responden yang menyatakan setuju terhadap kemunculnya caleg muda di Desa Sribhawono, (3) Harapan masyarakat terhadap munculnya caleg muda di Desa Sribhawono diperoleh

sebanyak 42,85% atau 18 responden yang menyatakan setuju terhadap intelektual yang tinggi, moral yang baik, dan sosial yang menarik dari kemunculnya caleg muda di Desa Sribhawono.

**Kata Kunci :** *persepsi, masyarakat, calegmuda*

## **ABSTRACT**

### **COMMUNITY PERCEPTION OF THE EMERGENCE OF YOUNGLEGISLATIVE CANDIDATES IN LEGISLATIVE ELECTIONS IN 2019 IN SRIBHAWONO VILLAGE OF EAST LAMPUNG REGENCY**

**Oleh**

**Eva Yulianti**

The purpose of this research is to analyse and explain the society's perception of the emergence of young Caleg in legislative elections year 2019 in Sribhawono village East Lampung Regency. The research method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach. Sample number 42 respondents. Data collection techniques using polls and techniques supporting interviews and documentation.

The results showed: (1) The public understanding of the emergence of young legislative candidates in Sribhawono village was obtained by 47.61% or 20 respondents who expressed understanding of the intellectual, moral, social candidate of young legislature in Sribhawono village , (2) The public response to the emergence of young legislative candidates in Sribhawono village was obtained as much as 45.23% or 19 respondents who expressed their consent to the summit

of young legislative candidates in Sribhawono Village, (3) People's expectations of the emergence of Young legislative candidate in Sribhawono village acquired as many as 42.85% or 18 respondents expressed their consent to high intellectuals, good moral, and social interest from the summit of young legislative candidates in Sribhawono village.

Keywords: perception, community, young legislative candidate

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALEG MUDA DALAM  
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA  
SRIBHAWONO KAB. LAMPUNG TIMUR**

Oleh

**EVA YULIANTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN  
Pada  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALEG MUDA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA SRIBHAWONO KAB. LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Eva Yulianti**

No. Pokok Mahasiswa : **1513032018**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP/19820727 200604 1 002

Pembimbing II,

**Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN/0005058310

2. Mengetahui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002



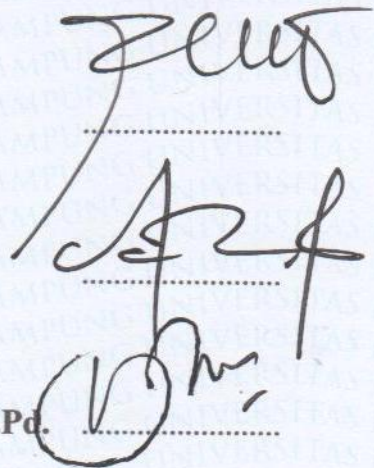
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**  
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 September 2019**



REWAT HIDUP

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah:

Nama : Eva Yulianti

NPM : 1513032018

Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Sribhawono RT 006 RW 003, Kec. Bandar Sribhawono, Kab.  
Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 26 September 2019

Penulis



Eva Yulianti  
NPM. 1513032018

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eva Yulianti lahir di Sribhawono pada tanggal 2 Juni 1997 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu Sri Lestari.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis antara lain:

1. Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi, Sribhawono yang diselesaikan pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar di SDN 3 Sribhawono, Bandar Sribhawono, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2012
4. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis pernah ikut dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan IPStahun 2015 dan FORDIKA dari tahun 2015-2018. Pada bulan Juli tahun 2018, penulis mengikuti Program Kuliah

Kerja Nyata (KKN) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama empat puluh

lima hari di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

## *MOTTO*

*Hidup itu pilihan, apapun yang membuatmu sedih tinggalkan,  
karena sangat banyak alasan untuk berbahagia.*

*(Fiersa Besari)*

*Kegagalan akan mengajarkan kita artinya perjuangan,  
keikhlasan, dan rasa tanggung jawab pada sebuah tujuan.*

*(Panji Ramdana)*

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT  
Atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,  
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti  
Dan kecintaanku kepada:*

*Yang tercinta kedua orang tuaku  
Ayahanda Sugito dan Ibunda Sri Lestari  
Yang selalu menjadi semangat dalam hidupku yang tanpa lelah  
Dan tulus dalam mendidik, membesarkan, dan selalu  
mendoakanku Dalam sujudnya serta harapan di  
Setiap tetesan keringatnya demi keberhasilanku*

*Almamater tercinta, PPKn FKIP Universitas Lampung*



## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Munculnya Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Desa Sribhawono Kab. Lampung Timur”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, motivasi, dan waktunya untuk mempelajari penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing I, dan Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si. selaku Wakil Dekan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku Wakil Dekan Bagian Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus sebagai pembimbing I terimakasih atas bimbingan, motivasi dan saran yang diberikan;
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingan, dukungan, motivasi dan saran yang diberikan;
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, M.Pd. selaku Pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya;
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku Pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak Ibu Dosen, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sugito dan Ibunda Sri Lestari terimakasih atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan serta iringan do'a yang tiada henti demi mengharapkan dan menantikan keberhasilanku;
12. Untuk mu yang selalu di hatiku dan selalu kurindukan "Abiku" terimakasih banyak sayang telah mengajarkan kedewasaan dan arti tanggung jawab, percayalah do'a bunda selalu untukmu.

13. Kakakku Wardiyanto dan kakak iparku Sunarti, Adikku Brian Ade Lutfidan ponakanku Aditya Permana yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan doa untuk keberhasilanku;
14. Untuk mu yang selalu mengusahakan kebahagiaan ku Fajar Adi S terima kasih selalu memberikan support, keceriaan, semangat dan doa untuk keberhasilanku;
15. Saudara seperjuanganku size XL squad (Revisya, Annisa, Tri, Anisa, Nadya, Linda, Latifa) kalian sangat istimewa yang telah mewarnai hidupku;
16. Sahabat sepermainanku ChoirulMusimah, AnggunShellyta M, yang telah membuat hari-hariku ceria penuh canda tawa dan selalu memberi semangat serta doa untuk keberhasilanku;
17. Sahabat kosanku MalidaOvita Sari, TyasDwi E, FitriWulandari yang telah memberikan semangat serta keceriaan ketika kegalauan melanda diperskripsian ini;
18. Teman-Teman seperjuangan penunggu gedung D dan gedung J Desi, Mella, Rini, Pio, Tuti, Ghita, Gita, Frentia yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2015, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT.
20. Kakak tingkat yang telah membantu dan memberikan motivasi serta doanya dan tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu kakak tingkat dari angkatan 2012-2014 , terimakasih atas dukungannya

21. Adik tingkat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu adik tingkat dari angkatan 2016-2018,terimakasih atas dukungannya
22. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Bandar Lampung, Juli2019

Penulis

Eva Yulianti  
NPM. 1513032018

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>       | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>          | <b>ix</b>   |
| <b>SANWACANA .....</b>           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>          | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>        | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>        | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>     | <b>xx</b>   |

### **1. PENDAHULUAN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....    | 1  |
| B. Identifikasi Masalah.....      | 7  |
| C. Pembatasan Masalah .....       | 8  |
| D. Rumusan Masalah .....          | 8  |
| E. Tujuan penelitian .....        | 8  |
| F. Kegunaan Penelitian .....      | 8  |
| 1. Kegunaan Secara Teoritis ..... | 8  |
| 2. Kegunaan Secara Praktis.....   | 9  |
| G. Ruang Lingkup Penelitian.....  | 9  |
| 1. Ruang Lingkup Ilmu .....       | 9  |
| 2. Objek Penelitian.....          | 9  |
| 3. Subjek Penelitian.....         | 10 |
| 4. Wilayah Penelitian .....       | 10 |
| 5. Waktu Penelitian .....         | 10 |

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Teori.....            | 11 |
| 1. Tinjauan Tentang Persepsi ..... | 11 |
| a. Pengertian Persepsi .....       | 11 |



|    |   |    |
|----|---|----|
| b. | Syarat-Syarat Mengadakan Persepsi .....           | 12 |
| c. | Faktor-Faktor Persepsi .....                      | 13 |
| 2. | Tinjauan Tentang Masyarakat.....                  | 15 |
| a. | Pengertian Masyarakat .....                       | 15 |
| 3. | Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat .....        | 17 |
| a. | Pengertian Persepsi Masyarakat .....              | 17 |
| 4. | Tinjauan Tentang Pemilu .....                     | 18 |
| a. | Pengertian Pemilu .....                           | 18 |
| b. | Sistem Pemilihan Pemilih .....                    | 19 |
| c. | Penyelenggara Pemilu .....                        | 20 |
| d. | Tujuan Pemilu .....                               | 21 |
| 5. | Tinjauan Tentang Politik.....                     | 22 |
| a. | Pengertian Politik .....                          | 22 |
| b. | Partisipasi Politik .....                         | 24 |
| c. | Budaya Politik .....                              | 27 |
| 6. | Tinjauan Tentang Partai Politik .....             | 27 |
| a. | Pengertian Partai Politik .....                   | 27 |
| b. | Fungsi dan Peranan Partai Politik .....           | 30 |
| c. | Proses Perekrutan Calon Dalam Partai Politik..... | 35 |
| 7. | Tinjauan Tentang Badan Legislatif.....            | 41 |
| a. | Pengertian Badan Legislatif .....                 | 41 |
| b. | Fungsi Badan Legislatif .....                     | 42 |
| 8. | Tinjauan Tentang Kaum Muda .....                  | 44 |
| a. | Pengertian Muda .....                             | 44 |
| b. | Pemuda Dan Kepemimpinan Nasional .....            | 45 |
| c. | Caleg Muda .....                                  | 45 |
| B. | Kajian Penelitian Yang Relevan .....              | 47 |
| 1. | Penelitian Tingkat Lokal .....                    | 47 |
| 2. | Penelitian Tingkat Nasional .....                 | 47 |
| C. | Kerangka Pikir .....                              | 49 |

### III. METODOLOGI PENELITIAN

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Metode Penelitian .....                  | 51 |
| B. | Populasi dan Sampel .....                | 52 |
| 1. | Populasi .....                           | 52 |
| 2. | Sampel .....                             | 53 |
| C. | Variabel Penelitian .....                | 53 |
| D. | Definisi Konseptual Variabel .....       | 54 |
| E. | Definisi Operasional Variabel .....      | 55 |
| F. | Rencana Pengukuran Variabel .....        | 56 |
| G. | Teknik Pengumpulan Data .....            | 57 |
| 1. | Teknik Pokok .....                       | 57 |
| 2. | Teknik Penunjang .....                   | 58 |
| H. | Uji Validitas dan Uji Reliabilitas ..... | 59 |
| 1. | Uji Validitas .....                      | 59 |
| 2. | Uji Reliabilitas .....                   | 59 |
| I. | Teknik Analisis Data .....               | 61 |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Langkah-Langkah Penelitian .....      | 63  |
| 1. Persiapan pengajuan Judul.....        | 63  |
| 2. Penelitian Pendahuluan.....           | 63  |
| 3. Pegajuan Rencana Penelitian .....     | 64  |
| 4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data..... | 65  |
| B. Pelaksanaan Uji Coba Angket .....     | 66  |
| 1. Analisis Validasi Angket .....        | 66  |
| 2. Analisis Uji Reliabilitas .. ..       | 66  |
| C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... | 70  |
| 1. Sejarah Singkat Desa Sribhawono ..... | 70  |
| 2. Visi Misi Desa Sribhawono .....       | 74  |
| D. Deskripsi Data.....                   | 75  |
| E. Pembahasan .....                      | 101 |

#### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 123 |
| B. Saran .....    | 124 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>   | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 1. Daftar Usia Calon Tetap DPRD Kabupaten Lampung Timur 2019 .....   | 3              |
| 2. Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih .....   | 52             |
| 3. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Desa Sribhawono, Kab. Lampung Timur. Dari 10 Orang Di Luar Responden Untuk Kelompok Item Ganjil (X) ..... | 67             |
| 4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Desa Sribhawono, Kab. Lampung Timur. Dari 10 Orang Di Luar Responden Untuk Kelompok Item Genap (Y) .....  | 68             |
| 5. Distribusi Hasil Antara Item Ganjil (X) Dan Item Genap (Y).....   | 68             |
| 6. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Pemahaman.....   | 76             |
| 7. Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman .....  | 78             |
| 8. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Tanggapan .....  | 80             |
| 9. Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan.....   | 83             |
| 10. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Harapan .....   | 84             |
| 11. Distribusi Frekuensi Indikator Harapan .....   | 87             |
| 12. Hasil Persentase Persepsi Masyarakat dengan Indikator Pemahaman, Tanggapan dan Harapan (VariabelX) .....   | 88             |

|   |     |
|---|-----|
| 13. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda<br>Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Intelektual ..... | 89  |
| 14. Distribusi Frekuensi Indikator Intelektual .....  | 91  |
| 15. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda<br>Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Moral .....       | 93  |
| 16. Distribusi Frekuensi Indikator Moral.....   | 96  |
| 17. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda<br>Dalam Pemilihan Legislatif Pada Indikator Sosial .....      | 97  |
| 18. Distribusi Frekuensi Indikator Sosial.....  | 100 |
| 19. Hasil Persentase Caleg Muda Dengan Indikator intelektual, Moral,<br>Sosial (Variabel Y) .....                                 | 101 |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1. KerangkaPikir .....  | 50             |
| 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Pemahaman.....    | 78             |
| 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Tanggapan.....    | 82             |
| 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Harapan.....      | 86             |
| 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Intelektual ..... | 91             |
| 6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Moral.....        | 95             |
| 7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Sosial.....       | 99             |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Judul dari Dekanat FKIP Unila
3. Surat izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembimbing I
8. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembahas I
10. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembahas II
11. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I
12. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
13. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
14. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
15. Surat Izin Penelitian
16. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
17. Kisi-kisi Angket dan Angket
18. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
19. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
20. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
21. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
22. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas
23. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
24. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
25. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembahas

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana penyampaian hak demokrasi rakyat. Pemilihan umum menjadi indikator terpenting dalam paham demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya dalam menentukan siapa yang menjalankan roda pemerintahan di Negara nya. Hal ini sesuai dengan pengertian pemilu dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian di atas, melalui pemilu rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden serta wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).

Pemilu langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai wadah aspirasi dari rakyat itu sendiri.

Pelaksanaan pemilu saat ini berpedoman pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada tahun 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota lembaga legislatif. Pemilihan umum legislatif setelah amandemen UUD NRI 1945 telah terlaksana tiga kali yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar terbuka. Proporsional daftar terbuka adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Melalui sistem ini partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga mempunyai elektabilitas yang tinggi dimata para pemilih. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, dimana banyaknya partai politik yang mengusung caleg muda yang memiliki popularitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dari partai politik itu sendiri.

Pemilu dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di provinsi Lampung. Pemilu di provinsi Lampung diikuti oleh 16 partai politik, masing-masing partai tersebut mengusung caleg-caleg nya untuk mengisi kursi legislatif. Jumlah anggota legislatif yang mengikuti pemilu ditingkat provinsi Lampung ialah 969 calon dari 16 partai politik. Sedangkan untuk di masing-masing daerah kabupaten dilaksanakan pula pemilihan legislatif kabupaten, salah satunya adalah kabupaten

Lampung Timur. Pemilu di kabupaten Lampung Timur diikuti oleh 16 partai politik. Masing-masing partai tersebut mengusung caleg-calegnya untuk mengisi kursi legislatif. Jumlah anggota legislatif yang mengikuti pemilu ditingkat kabupaten Lampung Timur ialah 498 dari 16 partai politik.

Legislatif merupakan bentuk kekuasaan untuk membuat undang-undang dan berfungsi menampung aspirasi dan keinginan rakyat demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan negara baik pusat maupun daerah dan untuk mengisi kekuasaan dilembaga legislatif ini diperlukan orang-orang terpilih yang mewakili rakyat disuatu daerah. Sebelum menjadi anggota legislatif, seseorang harus melalui beberapa tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi, yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Seseorang yang telah terdaftar sebagai calon tetap inilah yang disebut sebagai calon legislatif yang akan memperebutkan suara rakyat pada pemilihan umum.

Pada pemilu tahun 2019 pemilihan anggota legislatif diwarnai munculnya calon anggota legislatif muda yang bersaing dengan calon anggota legislatif lainnya yang telah lama berkecimpung dalam parlemen. Berikut daftar usia caleg tetap DPRD kabupaten Lampung Timur 2019:

**Tabel 1 Daftar Usia Calon Tetap DPRD Kabupaten Lampung Timur 2019**

| No | Jenis Kelamin | Caleg Usia<br>18-30 Tahun (Muda) | Caleg Usia<br>Diatas 31 Tahun<br>(Tua) |
|----|---------------|----------------------------------|--|
| 1  | Laki-Laki     | 40                               | 248                                    |
| 2  | Perempuan     | 75                               | 135                                    |
|    | Jumlah        | 115                              | 383                                    |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Berdasarkan data di atas calon anggota legislatif muda yang mengikuti pemilu berasal dari berbagai golongan, status sosial dan tingkat pendidikan yang beragam. Caleg-caleg muda ini masuk ke pemilu legislatif dengan membawa warna baru dalam dunia politik, yang biasanya pemilu diikuti oleh orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik namun saat ini banyak caleg muda yang ikut dalam pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu caleg yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) caleg muda ini mengikuti pemilu memiliki tujuan yaitu selain ingin menjadi anggota dewan beliau juga mengatakan ingin melakukan pembaharuan terhadap sistem kemudian pembaharuan tentang cara berfikir masyarakat untuk menjadi maju. Caleg muda tersebut mengatakan bahwa beliau sangat yakin dan percaya dengan bekal semangat mudanya ia mampu melakukan perubahan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat ini caleg muda sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat. Komitmen yang kuat harus menjadi modal bagi kaum muda ketika memutuskan untuk terjun di politik. Selain itu, narasi politik yang kuat juga menjadi jalan mereka untuk terjun ke dunia politik.

Dalam bidang pendidikan caleg muda memang tidak diragukan lagi, mereka biasanya berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi dan mempunyai cita-cita yang idealisme. Semangat dan narasi yang mereka miliki pun cukup meyakinkan. Caleg muda yang muncul pada pemilu tahun 2019 ini berkisar rentan usia 20-30 tahun. Zaman dulu yang menyalonkan diri menjadi anggota legislatif rata-rata usia matang dan memiliki latar belakang murni dari dunia politik. Tetapi sekarang dunia perpolitikan mengalami kemajuan. Banyak pemuda yang menyalonkan dirinya. Ragam cara yang dilakukan para tokoh pemuda untuk bersaing dengan para senior. Bertarung di daerah pilihan bukan hal yang mudah, tetapi keaktifan caleg muda justru lebih semangat.

Pada pemilu tahun ini caleg muda memiliki kontribusi nyata untuk merubah tradisi politik yang sudah terlanjur tidak dipercaya dimasyarakat. Kebanyakan dari kemunculan caleg muda pada tahun ini paling tidak mereka sudah pernah merasakan era diktator dan era kebebasan jadi para caleg milenial ini dapat membandingkan dua era itu dengan cara pandang yang lebih ideal. Meski demikian bukan berarti keduanya menafikan politisi senior. Pengalaman politisi senior bisa menjadi pembelajaran bagi caleg muda yang akan maju di parlemen.

Pemilu tahun ini banyak dari caleg muda yang tidak alergi terjun ke dunia politik. Bermodal semangat perubahan para caleg muda ini optimis menatap pertarungan memperebutkan hati rakyat. Meskipun di lapangan masih ada yang belum tentu menerimanya tetapi caleg milenial ini harus bisa menarik simpati masyarakat.

Karena sejak zaman orde baru politisi masih di dominasi para senior. Kala itu anak muda jadi anggota dewan adalah sebuah keniscayaan. Urusan duit harus disadari menjadi kendala penting. Alat perjuangan untuk bertemu calon pemilih. Sekaligus untuk membeli perlengkapan kampanye. Namun caleg muda selalu punya cara sendiri untuk menarik perhatian para pemilih.

Masyarakat pemilih masih membutuhkan bukti yang bisa meyakinkan bahwa caleg muda tersebut memang mempunyai kompetensi dan berkapasitas sebagai wakil rakyat. Tantangan ini oleh caleg muda harus bisa dihadapi dengan menunjukkan kapasitasnya, kompetensinya dan terutama integritasnya kepada masyarakat. Visi dan misi atau janji serta program dan harapan masyarakat di daerah pilihannya harus bisa ditangkap dan benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dan kemudian dirumuskan secara gamblang yang mudah dipahami masyarakat.

Kondisi fisik yang masih segar bugar dan mengedepankan ide-ide cemerlangnya. Keaktifan tokoh pemuda yang belum jadi arus utama dalam dinamika politik Indonesia sering dipandang sebelah mata karena aspek pengalaman. Dari sisi pengalaman, mereka kalah jauh dari para politisi senior yang telah bertarung berulang kali dalam pemilu. Meskipun tidak memiliki *background* di dunia politik, yang terpenting wawasan yang luas serta memiliki keinginan dan kepercayaan diri yang baik. Tapi yang perlu diingat, aspek pengalaman bisa

bermakna keberadaan negara terhadap sistem atau karakter politik. Kini para politisi baik yang senior ataupun pemula mempersiapkan dirinya pada pileg 2019.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota KPU Provinsi Lampung beliau mengatakan bahwa ada beberapa caleg muda sebagai pengganti menjadi wakil rakyat, dewan berpengalaman bisa saja sebatas menjadi petugas partai politik karena cenderung mewakili elite politik. Tetapi jika keaktifan tokoh pemuda bisa meyakinkan masyarakat untuk menjawab kebutuhan perbaikan parlemen, identitas muda caleg bisa jadi aspek yang menentukan elektabilitas.

Proses dan hasil pemilu 2019 bisa jadi gambaran kuantitas dan kualitas politik muda di Indonesia. Bukan hanya menggambarkan partai politik dengan segala klaim atau slogan “pro pemuda”, tapi juga menggambarkan sejauh mana identitas pemuda diapresiasi dan mempengaruhi kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Desa Sribhawono Kab. Lampung Timur

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Banyaknya calon anggota legislatif muda yang mengikuti pemilu
2. Munculnya anggapan masyarakat bahwa caleg muda kurang berkompeten untuk mengikuti pemilu pada tahun 2019 untuk menjadi wakil rakyat
3. Kurangnya pemahaman caleg muda dalam berpolitik



4. Caleg muda dianggap hanya untuk memenuhi kuota calon legislatif dalam partai
5. Pendidikan caleg muda bukan menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat
6. Persepsi – persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada pemilu 2019.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada Persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada pemilu 2019.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap caleg muda dalam pemilihan legislatif tahun 2019?”.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan persepsi masyarakat terhadap caleg muda. Dari hal itu maka kita dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap munculnya caleg muda dan dapat menyikapi kampanye dari caleg muda.

### **F. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian pendidikan politik dan kenegaraan karena

mengkaji masalah politik berkaitan dengan munculnya caleg muda pada pemilihan legislatif tahun 2019.

## **2. Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi ilmu politik.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai pemberi referensi tentang politik dan pemahaman terhadap nilai-nilai politik.
- c. Bagi caleg muda, agar menjadi acuan untuk merubah sikap atau pemikiran masyarakat karena meragukan pekerjaannya sekaligus menjadi referensi untuk memper
- d. baiki kualitas kinerja nya agar lebih baik.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup :

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan wilayah kajian politik dan kenegaraan karena bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pemerintahan negara dan politik praktis .

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada pemilihan legislatif 2019.

**3. Subjek Penelitian**

Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

**4. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

**5. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkan surat izin pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 7 Januari 2019 dengan nomor :95/UN26.13.01/PP.06.01/2019.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Tinjauan Umum Persepsi

##### a. Pengertian Persepsi

Menurut Moskowitz dan Orgel (Walgito, 2010:100) “persepsi merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap stimulus yang diterima”. Dengan demikian, dapat dikemukakan persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *intergrated* dalam diri individu.

Menurut Widyastuti (2014: 34-35) “persepsi adalah proses asosiasi dimana informasi yang didapatkan melalui penginderaan dikaitkan dengan hal-hal yang ada dan pengalaman-pengalaman orang yang bersangkutan (perseptor) dimasa lampau, dimasa asosiasi ini terutama bekerja pada tahap penafsiran”.

Menurut Sarlito(2009:86) “persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang

kemudian masuk ke dalam otak didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman”.

Menurut Ihalauw (Turnip, 2016: 14) menyebutkan bahwa “Persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari defenisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dari yang lain, masyarakat dapat membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintetiskan bahwa persepsi adalah seseorang yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat indera yang kemudian ditafsirkan dan antara individu yang satu dengan individu yang lain penafsirannya berbeda-beda.

#### **b. Syarat-Syarat Mengadakan Persepsi**

Seperti yang telah disintetiskan bahwa persepsi merupakan individu yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat indera yang kemudian ditafsirkan dan antara individu yang satu dengan individu yang lain penafsirannya berbeda-beda. Maka agar individu dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Walgito (Zulfikar 2015 : 13) Seseorang dapat mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) atau dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

- b. alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis.

Menurut pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan suatu perhatian. Selain itu, proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis.

### **c. Faktor-Faktor Persepsi**

Persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi.

Menurut Walgito (2010: 101) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu:

### 1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

### 2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

### 3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemutusan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dari pendapat para ahli di atas peneliti dapat mensintesis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah adanya suatu objek tertentu kemudian disalurkan oleh alat indera ke otak dan kemudian otak mengolahnya

menjadi suatu persepsi dari apa yang diterima oleh alat inderanya. Selain itu suatu objek dapat pula dipersepsikan secara berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, karena beberapa sebab diantaranya adalah karena seseorang memiliki pola berpikir yang berbeda.

## 2. Tinjauan Tentang Masyarakat

### a. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah '*zoon politicon*' yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup tersendiri. Manusia tidak lepas dari manusia yang lainnya, karena ia hidup bersama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:

- a. keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya (yaitu masyarakat).
- b. keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia member reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam melakukan interaksi



manusia terikat dalam suatu kumpulan yang dinamakan masyarakat. Menurut Soemarjan (Soekanto, 1993:92) menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”.

Menurut MacLever dan Page (Soekanto, 1993: 22) menyebutkan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pergolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia”.

Menurut Soekanto (1993: 103-104) mengartikan “masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.

Menurut Soekanto (1993: 105) sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri pokok sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama dua orang. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada
- b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama

- c. Adanya keasadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian suatu kesatuan
- d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas
- e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesisakan masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah karena proses\ masyarakat yang dapat menyebabkan terjaidnya perubahan itu proses tersebut dapat terjadi karena manusia hidup dengan adanya tuntutan zaman yang secara tidak langsung mengharuskan terjadinya perubahan.

### **3. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat**

#### **a. Pengertian Persepsi Masyarakat**

Sari (2015: 18-19) Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurut Robbins (Sari 2015: 19) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat ada 3 yaitu:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan coba penafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Sehingga dapat di sintetiskan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses ulang dilakukan sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya dan memberikan tanggapan yang bersifat positif maupun negatif mengenai suatu hal.

#### **4. Tinjauan tentang Pemilu**

##### **a. Pengertian Pemilu**

Di kebanyakan Negara Demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan

kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akuratnya partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Pengertian pemilu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Taniredja (2013:139) “mengatakan bahwa Pemilu merupakan realisasi kedaulatan rakyat. Rakyat berhak menentukan pemerintahan, oleh karenanya harus dipilih wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat, yang dapat membawa aspirasi rakyat, sehingga wakil-wakil rakyat ini harus rakyat sendirilah yang menentukan/memilih, dengan cara pemilu”.

## **b. Sistem Pemilihan Umum**

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 461-462) sistem pemilihan umum berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil biasanya disebut sistem Distrik).

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang

biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya.

2. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya disebut Proporsional).

Dalam sistem proporsional satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para calon, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Seandainya dalam wilayah tersebut dipakai sistem proporsional wilayah yang itu bisa berbentuk kesatuan administratif (misalnya provinsi) dianggap sebagai kesatuan yang keseluruhannya berhak atas 10 kursi. Jumlah kursi yang diperoleh secara nasional oleh setiap partai menentukan jumlahnya diparlemen, artinya presentasi perolehan suara secara nasional dari setiap partai sama dengan presentasi perolehan kursi dalam parlemen.

### **c. Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

#### **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara

pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

#### 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 155 DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **d. Tujuan Pemilu**

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting

bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim (Taniredja 2013: 140) Tujuan pemilu di Indonesia paling tidak ada empat, yaitu :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan
2. pemerintah secara aman dan tertib
3. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
4. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asosiasi warga Negara.

## **5. Tinjauan Tentang Politik**

### **a. Pengertian Politik**

Menurut Maran (Safitri 2013:7) “politik merupakan studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan”.

Menurut Surbakti (2010: 2) “mengatakan bahwa konsep politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”.

Menurut Budiardja (2008: 15) “mengatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis”.

Usaha menggapai kehidupan yang harmonis ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternative serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Hague (Budiardja, 2008: 16) ”mengatakan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya”.

Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani “*polis*” yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi “*polites*” yang berarti warga negara, “*politeia*” yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan “*politikos*” yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesis bahwa politik mengandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas



pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.

#### **b. Partisipasi Politik**

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial.

Menurut Herbert McClosky (Budiardjo, 2008:367) “mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Menurut Samuel dan Joan (Budiardjo 2008: 369) Partisipasi politik adalah : partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Syarbaini (Budiardjo2008: 369) “mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesis bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.

Di negara-negara Demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar legitimasi yang

tinggi. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan penginjawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

### **c. Budaya Politik**

Menurut Budiardo (2008:43) “mengatakan bahwa budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya”.

Macam-macam budaya politik adalah :

#### 1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial adalah suatu budaya dimana tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih sangat rendah.

#### 2. Budaya Politik Kaula/Subjek

Budaya politik kaula adalah suatu budaya dimana masyarakatnya cenderung lebih maju dibanding ekonomi maupun sosial.

#### 3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya dimana masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur proses politik dan administratif.

## **6. Tinjauan Tentang Partai Politik**

### **a. Pengertian Partai Politik**

Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi membutuhkan lembaga politik sebagai instrument demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut Partai Politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan

orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Menurut Carl. J. Friedrich (Budiardja, 2008:404) mengemukakan bahwa:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Menurut Neumann (Budiardja, 2008:404) “menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Menurut Sartori (Budiardjo, 2008:404-405) mengatakan bahwa “partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesis bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi, pemilihan umum merupakan

jalan bagi partai-partai politik untuk menempatkan calonnya menduduki jabatan-jabatan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah partai politik dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, maka partai politik harus bisa menempatkan orang-orang yang duduk di parlemen yang tentunya harus memenangkannya.

Untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan tersebut salah satunya adalah dengan merekrut kader-kader yang terbaik untuk duduk dilembaga pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang telah mereka rumuskan sebagai visi organisasi dapat dijalankan. Karena itu, untuk menjadi sebuah partai Politik yang dapat merebut simpati masyarakat serta mampu membuat kebijakan-kebijakan politis yang baik, dibutuhkan kader-kader yang mumpuni dan kredibilitas partai yang tepat sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik, serta untuk menjaga eksistensi sebuah partai politik tersebut, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan rekrutmen politik dengan tujuan mengajak orang-orang yang dianggap cakap atau mampu baik dalam hal menjalankan pemerintahan maupun menjaga eksistensi partai itu sendiri.

Rekrutmen kepemimpinan dan anggota lembaga kenegaraan nasional dan lokal dibidang eksekutif dan legislatif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Partai politik melaksanakan suatu tugas penting di dalam pemerintahan. Partai politik bersama masyarakat berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang baik sesuai kepentingan mereka

atau kelompok yang mendukung mereka, serta mengorganisir dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu. Walaupun sangat banyak yang dilibatkan di dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai politik bukanlah pemerintah. Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan orangnya untuk jabatan publik, dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih.

### **b. Fungsi dan Peranan Partai Politik**

Fungsi partai politik berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan sistem politik yang lebih luas lagi seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Namun demikian, secara umum fungsi utama partai politik, adalah sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Menurut Budiardja (2008:405) Berikut ini beberapa fungsi dan peranan partai politik dalam sistem politik:

#### 1. Sarana komunikasi politik

Di masyarakat modern seperti Indonesia yang terdapat berbagai macam keaekaragaman tentu banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau satu kelompok pendapat tersebut akan di tampung dan digabungkan dengan pendapat maupun aspirasi yang sama . Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi itulah

salah satu fungsi komunikasi partai politik. Sehingga partai politik memiliki peran yang cukup strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Kepentingan rakyat ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan agar eksistensi partai politik tetap terjaga dalam kancah perpolitikan dan tidak ditinggalkan oleh rakyat yang diwakilinya.

## 2. Sarana sosialisasi dan pendidikan politik

Partai politik mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan seluruh wacana baik berupa visi dan misi politiknya kepada rakyat. Wacana politik ini dituangkan dan dapat dilihat melalui visi, misi, *platform* dan berbagai program yang diemban oleh partai politik. Rakyat dalam hal ini harus diperlakukan tidak hanya sebagai subjek tetapi sekaligus juga sebagai objek. Dengan demikian rakyat akan tumbuh menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam berpolitik dan berdemokrasi.

## 3. Sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain



untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan.

#### 4. Sarana peredam dan pengatur konflik

Partai politik dituntut untuk memiliki kepekaan dan sensitifitas yang tinggi terhadap berbagai potensi konflik yang dari waktu kewaktuintensitasnya semakin meningkat. Partai politik memiliki kewajiban untuk meredam dan mengatur potensi konflik agar tidak meledak dan menimbulkan masalah baru. Konflik memang secara alamiah ada, tetapi yang penting adalah bagaimana mengelola potensi konflik yang ada agar menjadi energi, spirit dan *support* dalam merumuskan sebuah kebijakan politik untuk semua yang menguntungkan semua pihak.

Menurut Surbakti (2010: 149) fungsi dan peranan partai politik yaitu:

##### 1. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya.

##### 2. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk

menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang.

### 3. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah.

### 4. Pengendalian konflik

Konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

### 5. Kontrol politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

Berdasarkan hal tersebut bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai

politik juga mempunyai tujuan, dimana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya partai politik ini masyarakat Indonesia semakin mengenal pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat. Sehingga untuk menjadi sebuah partai politik yang dapat merebut simpati masyarakat serta mampu membuat kebijakan-kebijakan politis yang baik, dibutuhkan kader-kader yang mempuni sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik, serta untuk menjaga eksistensi sebuah partai politik tersbeut, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan rekrutmen politik guna mengajak orang-orang yang dianggap cakap atau mampu baik dalam hal menjalankan pemerintahan maupun menjaga eksistensi partai itu sendiri.

### **c. Proses Perekrutan Calon Dalam Partai Politik**

Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

Menurut Suharno (2004:117) “Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan

administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik”. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Menurut Czudnomski (2004:256) mengemukakan mekanisme rekrutmen politik antaralain:

1. Rekrutmen terbuka, dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya.

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a. Mekanismenya demokratis
- b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.

Terdapat beberapa variabel penting dalam proses rekrutmen dan pengembangan kader yaitu:

- a. Kualitas Rekrutmen

Partai harus memiliki kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat.

Biasanya, dalam era baru demokrasi, partai merekrut para kandidat yang

bersedia untuk memberikan kompensasi politik dan keuangan untuk pencalonan dirinya. Kualifikasi standar sebaiknya mencakup aspek-aspek, seperti integritas, dekat dengan rakyat (*societal roots*), pengalaman politik, dan keterampilan dasar.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Politik

1. Persoalan di sekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimalkan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi di negara ini untuk dipersempit dampaknya. Sehingga iming-iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.
2. Kekuasaan rill berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan di dalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi.

c. Jalur-jalur Politik dalam Rekrutmen Politik

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antarpantai yang berperan dalam suatu lingkup

- politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
  3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
  4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”.



## 5. Pembagian Jabatan di dalam Politik

Jabatan politik artinya jabatan yang diperoleh sebagai dari hasil pemilihan rakyatnya atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan dikenal sebagai seorang “politikus”.

### d. Sistem Perekrutan Politik Terdiri dari Beberapa Cara:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian
2. Latihan ( *training* ) kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang digunakan di Yunani kuno).
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik dengan baik dan harus menerapkan teknik-teknik yang baik pula dalam berpolitik.
6. Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Petronag masih memiliki keterkaitanya dengan budaya korupsi.

7. Koopsi ( pemilihan anggota-anggota baru ) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

## 7. Tinjauan Tentang Badan Legislatif

### a. Pengertian Badan Legislatif

Menurut Budiardja (2008:315) “mengatakan bahwa badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang.

Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi lambat laun seperti penyerahan dana (semacam pajak) oleh golongan elite disertai tuntunan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang

membatasi kekuasaan pemerintah yang tadinya berkekuasaan absolut. Dengan perkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu. Badan legislatif di Negara-negara Demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya.

#### **b. Fungsi Badan Legislatif**

Menurut Budiardja (2008:322) fungsi badan legislatif yang paling penting ialah:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.

Sedangkan menurut Budiardja (2008:323) fungsi badan legislatif antara lain:

##### **1. Fungsi Legislasi**

Tugas utama legislasi terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli dibidang itu. Untuk membahas rancangan

undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Akan tetapi dewasa ini telah menjadi gejala umum bahwa titik berat di bidang legislatif telah banyak bergeser ke badan eksekutif. Mayoritas undang-undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya.

## 2. Fungsi Kontrol

Dengan demikian berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.

## 3. Fungsi Lainnya

Di samping fungsi legislasi dan kontrol badan legislatif mempunyai beberapa fungsi lain. Dengan meningkatnya peranan badan eksekutif dan berkurangnya peranan badan legislatif di bidang perundang-undangan, dewasa ini lebih ditonjolkan peranan edukatifnya. Badan legislatif dianggap sebagai forum kerja sama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana beraneka ragam pendapat dibicarakan dimuka umum. Suatu fungsi lain yang tidak kalah pentingnya ialah sebagai sarana rekrutmen

politik. Ia merupakan *training ground* bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.

## **8. Tinjauan Tentang Kaum Muda**

### **a. Pengertian Muda**

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi generasi perubahan.

Menurut Nurmalisa (2017:4) “mengatakan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai”.

Menurut Taufik Abdulah (Susanto, 2015: 4) “pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil”. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, mendefinisikan bahwa “ Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disintesis bahwa pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis

namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Didalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karna pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai masa depan. Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan itu merupakan beban moral yang ditanggung bagi pemuda untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan generasi tua.

#### **b. Pemuda Dan Kepemimpinan Nasional**

Dalam konteks bela Negara, kepemimpinan nasional menjadi wujud strategis menentukan ketangguhan ketahanan nasional sebuah negara.

Mengutip Yuddy Chrisnandi (Nurmalisa,2017:10) “menjelaskan bahwa Indonesia adalah proyek bersama yang belum selesai”.

Jiwa nasionalisme kaum muda yang bukan dibentuk oleh sebuah rezim, melainkan lahir dari hati nurani akan menjadi kekuatan yang tangguh bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Peradaban yang tangguh disokong oleh kepemimpinan yang tangguh pula. Kepemimpinan yang tangguh dapat kita lihat pada diri pemuda.

#### **c. Caleg Muda**

Calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Legislatif merupakan bentuk kekuasaan untuk membuat undang-undang dan berfungsi menampung aspirasi dan keinginan rakyat demi terwujudnya

kemakmuran, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan negara baik pusat maupun

daerah dan untuk mengisi kekuasaan di lembaga legislatif ini diperlukan orang-orang terpilih yang mewakili rakyat di suatu daerah. Sebelum menjadi anggota legislatif, seseorang harus melalui beberapa tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi, yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Seseorang yang telah terdaftar sebagai calon tetap inilah yang disebut sebagai calon legislatif yang akan memperebutkan suara rakyat pada pemilihan umum. Pada pemilu tahun 2019 pemilihan anggota legislatif diikuti oleh calon-calon yang usianya relatif lebih muda dibandingkan pemilu tahun sebelumnya.

Politik praktis saat ini bukan hanya diminati oleh para senior organisasi kemasyarakatan tetapi juga kalangan muda ikut aktif di dunia politik. Para calon anggota DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI juga nampak kaum muda mewarnai gelaran Pemilu 2019. Pemilihan umum merupakan satu-satunya cara untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan seperti dalam penentuan anggota legislatif maupun eksekutif.

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

### **1. Penelitian Tingkat Lokal**

Penelitian dilakukan oleh Fitra Endi Fernanda Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2012 dengan judul penelitian yaitu Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, subjek penelitian ini adalah pemilih pemula Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Teknik pokok dalam pengumpulan data menggunakan teknik angket.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa pemahaman pemilih pemula terhadap pilkada serentak adalah 58,92% dengan kategori cenderung tidak paham dari 56 responden yang diteliti persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai pemilihan umum dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif hanya saja perbedaan variabel Y nya yaitu mengenai pilkada serentak sedangkan penelitian penulis mengambil variable Y yaitu tentang munculnya caleg muda pada pemilu 2019.

### **2. Penelitian tingkat nasional**

Penelitian dilakukan oleh Rohana Handaningrum mahasiswa Program Studi Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul Persepsi



Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (Political trust) dengan Partisipasi Politik. Penelitian ini fokus terhadap studi khalayak subjeknya adalah persepsi terhadap kualitas dari calon anggota.Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif (DPR/DPRD) serta memilih Presiden dan wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas calon anggota legislatif.

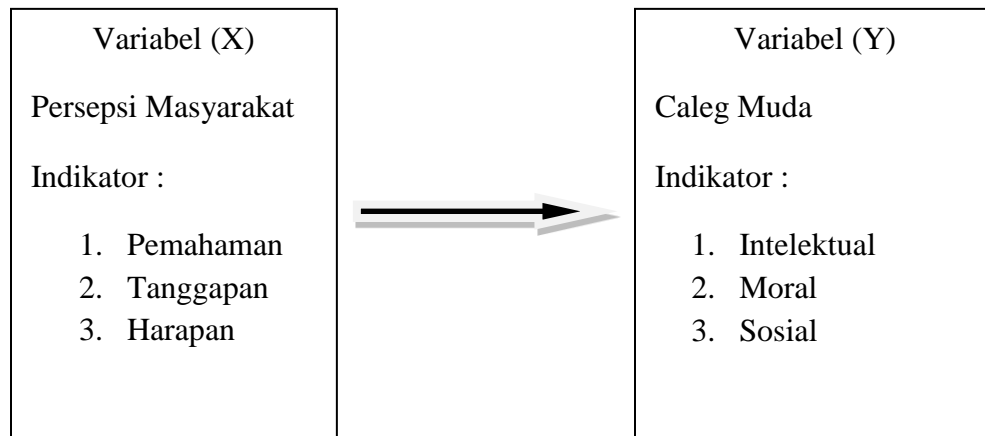
Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan terpilih sejumlah 150 responden yang dipilih secara *Purposive Sampling*. Dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 150 responden menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan tidak signifikan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengenai persepsi terhadap caleg. Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah objek penelitian yang penulis lakukan lebih kearah kualitas caleg yang bertujuan untuk mengetahui hubungan Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (*Political trust*) dengan Partisipasi Politik.

### C. Kerangka Pikir

Politik Indonesia, setidaknya sejak orde baru didominasi para senior. Belakangan ini generasi milenial pun mencoba merebut posisi. Posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada tahun politik sekarang ini. Mereka adalah bagian penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik ditingkat daerah maupun nasional. Dalam hal ini partisipasi politik generasi milenial tentu sangat substansial karena dari presentase jumlah pemilih, generasi milenial menyumbang suara cukup banyak dalam keberlangsungan pemilu 2019. Memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Namun, partisipasi politik tidak semata-mata diukur berdasarkan pemberian suara pada saat pemilu. Partisipasi politik dapat diukur dari seberapa masyarakat peduli terhadap politik itu sendiri. Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama di dalam suatu lingkungan tersebut terhadap suatu objek mengenai munculnya calon anggota legislatif muda yang diamati berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sehingga memungkinkan pemahaman dan tanggapan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda walaupun objeknya sama. Dalam hal ini peneliti melihat terdapat persepsi masyarakat terhadap suatu objek dapat berupa persepsi positif dan persepsi negatif terhadap calon anggota legislatif muda dalam pemilu di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap calon anggota legislatif muda dalam pemilihan umum di Desa Sribhawono Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney (Nazir 2003: 54-55) mengatakan bahwa “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Menurut Sugiyono (2018: 14) mengatakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif kuantitatif ini merupakan penyidikan yang menuntut dan menafsirkan data yang ada misalnya pandangan tentang suatu proses yang sedang

berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

Sejalan dengan definisi di atas maka penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini sangat cocok dalam penelitian ini, karena dengan jenis penelitian ini sasaran kajiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Dalam Pemilu 2019 di Desa Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010 : 173) "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

**Tabel 2 Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.**

| No       | Nama Dusun | Jumlah Pemilih |
|----------|------------|----------------|
| <b>1</b> | Dusun 1    | 105            |
| <b>2</b> | Dusun 2    | 107            |
| <b>3</b> | Dusun 3    | 110            |
| <b>4</b> | Dusun 4    | 101            |
|          | Jumlah     | <b>423</b>     |

Sumber Data: DPT di Balai Desa Sribhawono

## 2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti)”. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antar 10-15% atau 20-25% lebih.

Berdasarkan jumlah populasi sebesar 423 maka sampel penelitian ini ialah:

$$n = \frac{10}{100} \times 423 = 42,3 \text{ dibulatkan menjadi } 42.$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *random sampling*. Cara ini dipilih karena selain meringankan beban pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap kelompok mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur kemudian peneliti memilih secara acak responden yang akan dipilih sesuai dengan kriteria, hingga mencapai jumlah 42 orang.

## C. Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) sebagai berikut:

1. Variabel bebas yaitu persepsi masyarakat
2. Variabel terikat yaitu munculnya caleg muda dalam pemilu 2019

#### **D. Definisi Konseptual Variabel**

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya. Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

2. Caleg Muda

Caleg muda adalah politikus muda yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, bekal mereka adalah komitmen yang kuat serta narasi politik yang mudah diterima saat ini.

3. Legislatif

Legislatif adalah lembaga yang mengatur atau membuat undang-undang.

Tugas pokok legislatif adalah mengatur, dalam arti membuat kebijakan yang bersifat strategis atau membuat undang-undang.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti

variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur.

Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemahaman. Indikator ini diukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap munculnya Caleg muda pada pemilu 2019
  2. Tanggapan. Indikator ini diukur dari tanggapan masyarakat terhadap munculnya Caleg muda pada pemilu 2019
  3. Harapan. Indikator ini diukur dari harapan masyarakat terhadap munculnya Caleg muda pada pemilu 2019
2. Politik praktis saat ini bukan hanya diminati oleh para senior organisasi kemasyarakatan tetapi juga kalangan muda ikut aktif di dunia politik. Para calon anggota DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI juga nampak kaum muda mewarnai gelaran Pemilu 2019.

Berkaitan dengan Caleg muda maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Intelektual. Indikator ini diukur dari tingkat pendidikan Caleg muda
2. Moral. Indikator ini diukur dari perilaku Caleg muda
3. Sosial. Indikator ini diukur dari cara bersosialisasi Caleg muda



## **F. Rencana Pengukuran Variabel**

Rencana pengukuran variabel persepsi masyarakat terhadap caleg muda dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Desa Sribhawono Lampung Timur dengan menggunakan alat ukur angket yang berisikan indikator persepsi masyarakat yaitu:

- a. Pemahaman yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan
- b. Tanggapan yaitu bayangan atau kesan-kesan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek, dengan objek tersebut sudah tidak ada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan
- c. Harapan, yaitu menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan kepada Tuhan

Angket tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud menyimpulkan data. Angket yang diberikan adalah angket tertutup yang berisi jawaban dan pertanyaan telah disediakan. Angket akan berbentuk pertanyaan dan pilihan dengan akan diberikan tiga pilihan kemudian responden harus memilih salah satu pilihan jawaban.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

### **1. Teknik Pokok**

#### **a. Angket**

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik pokok dalam pengumpulan data penelitian, menurut Sugiyono (2015: 199) “teknik angket atau kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Sasaran angket adalah masyarakat Desa Sribhawono yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap. Responden memilih jawaban yang telah disediakan dari tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot yang bervariasi. Berikut ini skor untuk alternatif jawaban pada angket:

- a. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberikan nilai 3
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan nilai 2
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberikan nilai 1

Selanjutnya untuk mengolah nilai dalam tiap kelompok variabel maka diadakan kategorian nilai yaitu baik, sedang, buruk. Penskoran nilainya ditentukan oleh banyaknya item.

## **2. Teknik Penunjang**

### **a. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik pendukung salah satunya adalah wawancara. Dalam penelitian kuantitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang dapat mendukung hasil penelitian. Menurut Sugiono (2015: 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dari hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sebagian masyarakat di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur terkait dengan pengumpulan data penelitian. Data yang akan diambil melalui wawancara yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sribhawono mengenai caleg muda di bidang intelektual, moral dan sosial.

### **b. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data untuk memperoleh data yang lengkap mengenai informasi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan keterangan atau fakta-fakta yang terkait dengan objek peneliti.

Pengambilan data berupa foto yang akan dijadikan data pendukung.

## H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sesuai pendapat Arikunto (2010:211) bahwa ”Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat”.

Dari pendapat di atas validitas adalah merupakan tingkat kepercayaan dan kekuatan instrumen penelitian yang dilakukan dengan indikator faktor. Untuk uji validitas menggunakan *logical validity* dengan cara ”*judgement*”, yaitu dengan mengonsultasikan kepada beberapa orang ahli penelitian dan tenaga pengajar di lingkungan FKIP Unila. Dalam hal ini peneliti mengonsultasikan dengan dosen pembimbing, dari hasil konsultasi tersebut kemudian diambil revisi seperlunya.

### 2. Uji Reliabilitas

Penentuan reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada teori menurut Arikunto (2010:221), “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap dan ganjil.
- c. Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan menggunakan rumus *product moment* dengan angka kasar yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$\bar{X}$  = Skor rata-rat dari X

$\bar{Y}$  = Skor rata-rata dari Y

N = Jumlah Sampel.

Arikunto (2010:213).

- d. Untuk Reliabilitas angket dengan menggunakan rumus *Sperman*

*Brown* :

$$r_{11} = \frac{2x r_{1/21/1}}{(1 + r_{1/21/2})}$$

Keterangan :

$r_{11}$  : Reliabilitas instrumen

$r_{1/21/1}$  :  $r_{xy}$  yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen

( Arikunto, 2010:223 - 224)

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut :

0,90 – 1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 : Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 : Reliabilitas rendah

( Manasse Malo, 1985:139 )

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Maka, dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut:

- a. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12)

b. Penentuan tingkat presentasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Besarnya Presentasi

F = Jumlah Skor yang diperoleh

N = Jumlah Berkalian Seluruh Item dengan Responden.

Menurut Arikunto (2002:1996) mengatakan bahwa “banyaknya presentasi yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Kurang Baik

40% - 55% = Tidak Baik

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai persepsi masyarakat terhadap caleg muda dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap caleg muda dapat dikategorikan pada kategori baik. Hal ini berdasarkan analisis data mengenai pemahaman dan tanggapan yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap caleg muda, baik dalam segi ilmu pengetahuan maupun peran yang harus dilakukan dalam menanggapi para caleg muda. Masyarakat Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur juga menyetujui dengan adanya kehadiran caleg muda dalam pemilihan umum dengan menunjukkan sikap positif dalam proses pemilihan umum.
2. Kemunculan calon legislatif muda tahun 2019 di Desa Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan pada kategori baik. Hal ini berdasarkan analisis data mengenai intelektual, moral, dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin dapat terlihat pada caleg muda yang memiliki



pengetahuan yang baik dalam perpolitikan, serta mampu menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada:

### **1. Bagi Penulis**

Penulis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam membuat sebuah karya ilmiah dan memperbaiki tata tulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

### **2. Bagi Partai Politik**

Penelitian diharapkan dapat menjadi pembenah ditubuh partainya sesuai dengan normatif atas lahirnya partai politik guna menopang demokrasi di Indonesia. Dengan demikian anggota legislatif yang terlahir secara kualitas merupakan orang yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tentang dunia politik terlebih dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Masyarakat diharapkan lebih dapat memahami dan mengetahui latarbelakang calon legislatif yang akan menjadi seorang pemimpin, agar masyarakat tidak salah dalam menentukan pilihan yang dapat berakibat untuk lima tahun mendatang.

### 3. Bagi Caleg Muda

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para caleg muda agar dapat merubah pemikiran atau sikap masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima adanya kehadiran caleg muda dalam pemilihan umum. Serta caleg muda diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja sebagai seorang pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Miftah, Thoha. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2011. *Budaya Organisasi : Teori, Penelitian, dan Praktik*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Nurmalisa, Yunisca. 2017. *Pendidikan Generasi Muda*, Yogyakarta: Penerbit Media Akademi.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 2017, tentang Kepemudaan*
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum*
- Sari Maya Siti. Nurmalisa Yunisca. Yanzi Hermi. 2015. Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4 Nomor 5.
- Sarwono, Sarlito. 2012. *Pengantar psikologi Umum*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto.1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suharno.2004. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam era Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Turnip Darmeria Anna. Nurmalisa Yunisca. Suntoro Irawan. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4 Nomor 3.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Walgito, Bimo.2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Widyaastuti Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Zulfikar. Yanzi Hermi. Pitoewas Berchah. 2016. Persepsi Pengurus Osis Terhadap Peran Majelis Perwakilan Kelas Di SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4 Nomor 6.